



## BAB IV PENUTUP

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa dinamika politik internasional ternyata tidak hanya di dominasi oleh persoalan *high politic*, diantaranya konflik antar negara ataupun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu-isu global, diantara klandestin ataupun terorisme, namun juga masalah *low politic*, namun masih berkaitan dengan pencapaian kepentingan nasional suatu negara. Diantaranya adalah persoalan penghindaran pajak sebagai bagian dari dinamika globalisasi yang semakin kompleks yang semakin mengkaburkan batas-batas kedaulatan suatu negara.

Salah satu persoalan yang muncul adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional *Google Coprorations* di Inggris. Perusahaan berbasis internet menjadi persoalan ketika terjadi perbedeaan persepsi dan parameter tentang subyek dan obyek pajak, dimana *Google* menganggap keberadaan perusahaan perwakilan (*representatif coroporation*) tidak wajib untuk membayar pajak secara penuh, sedangkan bagi Inggris operasionalisasi *Google* memiliki tanggung-jawab secara penuh seperti perusahaan-perusahaan yang lain.

*Google* merupakan perusahaan yang berkembang secara dinamis bersamaan dengan semakin majunya penggunaan internet dan perangkat lunak lainnya. Di negara maju, seperti halnya Inggris, penggunaan internet bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder, namun telah menjadi bagian hidup masyarakat. Ini kemudian

menjadikan *Google* sebagai perusahaan yang menduduki peringkat pertama di dunia, termasuk di Inggris, khususnya pada layanan situs pencari, surat elektronik dan beberapa layanan lainnya.

Ditengah-tengah perkembangan *Google* di Inggris secara progresif, muncul persoalan tentang penghindaran pajak. Pada akhirnya *Google* bersedia untuk membayar berbagai pajak atas operasionalisasinya di Inggris setelah melalui serangkaian perdebatan dan pertimbangan yang cukup panjang. Pencapaian ini ternyata tidak lepas dari berbagai upaya pemerintah Inggris yang berupaya memperjuangkan penghindaraan pajak tersebut oleh *Google*.

Berbagai upaya yang dijalankan pemerintah Inggris dalam menangani penghindaran pajak oleh *Google* diwujudkan pendekatan politik dan hukum (legal formal), diantara melalui pembicaraan pada tingkatan parlemen. Ini membuktikan bahwa persoalan pajak oleh *Google* telah menjadi persoalan ekonomi perdata nasional di Inggris, dimana pada di parlemen, Inggris membentuk fraksi khusus, termasuk membangun *desk consulting*, yang beranggotakan praktisi, pakar pajak hingga staf khusus HMRC.

Kemudian upaya Inggris dalam menyelesaikan penghindaran pajak oleh *Google* ditindaklanjuti dengan investigasi dengan mengoptimalkan fungsi dari HMRC sebagai ujung tombak untuk menginvestigasi kasus ini dari awal hingga akhir, serta menentukan besaran pajak hingga sanksi secara seksama yang pada akhirnya berhasil menarik pajak secara keseluruhan pada akhir tahun 2016. Pada

akhirnya keberhasilan Inggris dalam menangani penghindaran pajak tersebut mampu menjadi motivasi bagi negara lain, seperti halnya Italia, Spanyol, Perancis termasuk Indonesia untuk mengikuti jejak yang sama yaitu meinta *Google* untuk membayarkan pajak secara penuh sebagai perusahaan operasional tetap, bukan sebagai perusahaan perwakilan.

Dengan demikian melalui penelitian ini maka dapat disimpulkan dan dibuktikan bahwa upaya yang dijalankan oleh Pemerintah Inggris dalam menangani penghindaran pajak yang dijalankan oleh Goggle Corporation di Inggris adalah melalui kebijakan secara sistematis dan komperehensif dengan melibatkan entitas politik pembuat kebijakan, yaitu parlemen untuk dapat mendukung penerapan diskresi penegakan hukum karena masalah ini tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan ketentuan normatif, namun juga masalah keadilan. Adanya alasan *Google Corporations* dalam *Double Irish Sandwich* menunjukkan bahwa perundang-undangan sistem perpajakan Inggris tidak cukup lengkap untuk mengakomodasi operasional perusahaan ini yang memang bergerak pada bidang telekomunikasi dan internet global yang memiliki banyak cabang, termasuk di beberapa negara Uni Eropa.

Keberadaan HMRC mampu memainkan peranan penting sebagai ujung tombak dalam upaya pengembalian dan pembayaran pajak secara penuh oleh Google. Investigasi hingga perhitungan secara teknis yang membuat Google akhirnya bersedia membayar penuh tunggakan pajak kepada pemerintah Inggris. Setelah melalui

beberapa tahapan dengan memberikan *tax notice* pada akhirnya menjadi tolok ukur keberhasilan HMRC bersama dengan stakeholder lainnya. Di sisi lain, bagi *Google* Inggris merupakan salah satu negara terpenting karena menjadi pangsa pasar terbesar *Google* di dunia setelah Amerika Serikat, sehingga ini akan memberikan pengaruh positif bagi kinerja bisnis *Google* di Inggris pada masa yang akan datang.

Melalui penelitian ini maka dapat dibuktikan bahwa upaya yang dijalankan oleh Pemerintah Inggris dalam menangani penghindaran pajak yang dijalankan oleh *Google Corporation* di Inggris jika dikaitkan dengan pendekatan IPE maka penghindaran pajak muncul berkaitan dengan perbuahan tata ekonomi-politik internasional Artinya dalam dinamika liberalisme-kapitalisme global, sebuah negara tetap perlu untuk membangun intervensi untuk mendukung kemajuan dan eksistensi ekonominya. Salah satunya melalui sektor pajak.

Dalam kondisi ekonomi-politik internasional yang penuh dengan ketidakpastian negara perlu hadir, meskipun menghadapi berbagai hambatan dan persoalan. Langkah Inggris untuk memperjuangkan pajak dari *Google Corporations* menunjukkan bahwa proteksi ekonomi melalui kebijakan politik menjadi sesuatu yang tetap bisa dibenarkan. Jika dikaitkan dengan teori IPE maka negara, seperti halnya Inggris harus dapat memperjuangkan nasionalisme. Persoalan penghindaran pajak merupakan masalah baru yang sebelumnya belum pernah dihadapi oleh pemerintah Inggris, Untuk itu, segala kemampuan yang dilakukan, khususnya melalui HMRC dan ATS menunjukkan bahwa intervensi pemerintah Inggris dalam menangani

penghindaran pajak Google Corporations merupakan bentuk *state-centric* ditengah-tengah globalisasi dan liberalisasi internasional yang memberikan supremasi positif bagi operasionalisasi perusahaan multinasional.